BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana, 2006). Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007).

Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi, rakyat mendapat pelayanan keamanan dan

jaminan ketertiban. Kerajaan Mataram raja-raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom (Muh. Bakhrun Effendi: 2006).

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak memang sudah tinggi tapi seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan keperluan yang dibutuhkan pemerintah untuk mejalankan roda pemerintahannya maka penerimaan disektor pajak harus lebih ditingkatkan kembali. Pemerintah tentunya memiliki cara agar penerimaan pajak dapat meningkat, yang ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Di Indonesia sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur, yaitu *Tax Policy, Tax Law,* dan *Tax Administration.* Jika semua unsur ini dijalankan dengan baik maka pengelolaan penerimaan dan pengeluaran di Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena ketiga unsur tersebut mempunyai keterkaitan yang kuat. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan (2006:25), sistem perpajakan terdiri dari : *1). Official Assesment System 2). Semi Self Assesment System 3). Full Self Assesment System 4). With Holding System.*

Wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan kepada negara, tentunya dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, sehingga wajib pajak bisa yakin akan besarnya pajak yang akan dilaporkan. Tapi dalam praktiknya tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas kekurangan pajak yang harus dibayar. Menurut perhitungan KPP Pratama Sumedang pada tahun

2007 terdapat penanggung pajak sebesar 536 dengan total tunggakan 3.375.513.075 sedangkan pada tahun 2008 terdapat penanggung pajak sebesar 1.451 dengan total tunggakan Rp. 3.757.343.944. Terlihat jelas bahwa terdapat peningkatan penanggung pajak sebesar 915 dengan total tunggakan sebesar 381.830.869. Oleh karena itu wajib pajak yang masih memiliki utang pajak wajib melunasinya berikut dengan biaya penagihannya. Akan dilakukan tindakan penagihan apabila wajib pajak tidak bersedia untuk melunasi utang pajak tersebut.

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang dengan berbagai kegiatan yang ada, sehingga penulis mengambil judul :

"TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG"

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang dicapai dari laporan kuliah kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak pada KPP Pratama Sumedang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi tentang bagaimana pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang.

2. Bagi Instansi

   Sebagai masukan dan bahan untuk mengevaluasi tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang.

3. Bagi Pihak Lain

   Dapat memberikan masukan sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang. Selain itu, hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terutama bagi yang akan mengadakan tinjauan kerja praktek mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap pelunasan utang pajak.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kerja Praktek di KPP Pratama Sumedang, penulis menggunakan metode *Block Release*, yaitu pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan dalam satu periode penuh yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at selama 20 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 29 Juli 2011.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut (Umi Narimawati dkk, 2010:39) :

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

   Melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan universitas yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

b. Wawancara atau *Interview*

   Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi-informasi itu berupa yang berkaitan dengan penagihan pajak.

c. Dokumentasi

   Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Mulai dari literatur, buku-buku yang ada. Adapun dokumen-dokumen yang menggambarkan penagihan pajak.

d. Kajian Pustaka atau *Library Research*

Peneliti melakukan suatu kegiatan dengan cara menulis, mencari dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di KPP Pratama Sumedang yang berlokasi di JL. H. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung. Telepon : 022-7333256, 7333225 Faksimile : 022-7337086.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu Kerja Praktek dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengam 29 Juli 2011. Berikut ini adalah aktivitas kerja praktek dan aktivitas pada KPP Pratama Sumedang.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek dan Aktivitas di Kantor

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU	PENEMPATAN
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jumat	07.30-16.00 WIB	Seksi Penagihan
2	Istirahat	Senin s/d Kamis	12.00-13.00 WIB	
		Jumat	12.00-13.30 WIB	
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-	

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agus				Sept				Okt				Nov				Des			
		2011	2011				2011				2011				2011				2011				2011				2011			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	**Tahap Persiapan Kerja Praktek**																													
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■	■	■	■	■																								
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■	■	■	■	■																								
	3. Pengajuan Kerja Praktek ke Instansi	■	■	■	■	■																								
	4. Persetujuan Kerja Praktek		■																											
	5. Mendapat Absen untuk KP			■																										
2.	**Pelaksanaan Kerja Praktek**																													
	1. Registrasi				■																									
	2. Kerja Praktek						■	■	■	■																				
	3. Selesai KP									■																				
3.	**Pelaporan Kerja Praktek**																													
	1. Pengajuan Judul																			■										
	2. Mulai Bimbingan Kerja Praktek dengan Dosen Pembimbing																			■	■	■								
	3. Revisi																				■	■								
	4. Pengumpulan Data																													
	5. Ujian Kerja Praktek																													

	6. Pengumpulan Laporan Kerja Praktek																												